

Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT Lestari Asri Jaya

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan 15313
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HT : PT LESTARI ASRI JAYA (LAJ)
 - b. SK IUPHHK-HT : SK. 430/Menhut-II/2006, 29 Agustus 2006
 - c. Luas Areal : ± 61.495 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Barito Pacific
Jalan Letjend S. Parman Kav 62-63 Jakarta
 - e. Waktu Pelaksanaan : 18 – 26 Oktober 2019

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jumat, 18 Oktober 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi BPHP Wilayah IV Provinsi Jambi	Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT LAJ diterima oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi awal dengan perwakilan BPHP Wil IV Provinsi Jambi.
Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 19 Oktober 2019 Base Camp Sungai Gelumpang	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Manajer Camp dan jajaran, serta staff PT LAJ. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, CARs pada Sertifikasi Awal, serta aturan yang digunakan dalam Audit Penilikan I. Tim Auditor meminta surat tugas representative dari PT LAJ untuk Audit Penilikan I. Tim Auditor menyampaikan akan menjaga kerahasiaan informasi PT LAJ.
Verifikasi Dokumen	Sabtu – Kamis, 19-24 Oktober 2019	Verifikasi Dokumen milik PT LAJ untuk memenuhi semua

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14 tahun 2016.
Observasi Lapangan	Minggu-Kamis, 20-24 Oktober 2019	Melakukan observasi kondisi lapangan PT LAJ terkait semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14 tahun 2016.
Pertemuan Penutup	Jumat, 25 Oktober 2019 Base Camp Sungai Gelumpang	Pertemuan penutup dihadiri oleh MR, Manager Camp dan Staff PT LAJ. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan. MR menandatangani Lembar Audit Lapangan Penilikan I PHPL.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	Jumat, 25 Oktober 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kantor BPHP Wil IV Provinsi Jambi	Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan PT LAJ kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang diterima oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT LAJ diterima oleh wakil dari BPHP Wil IV Provinsi Jambi. Tim auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 4 November 2019 Ruang Meeting Kantor LPPHPL PT GRS	a. PT LAJ dinyatakan lulus dengan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilikan I Penilaian

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Menerbitkan Sertifikat dan SK Keputusan Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT LAJ 2019.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT LAJ :

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Dokumen legal perusahaan meliputi akte pendirian, SK IUPHHK, RKUPHHK tersedia namun dokumen ijin pendukung sebagian kurang sesuai atau belum diperbarui atau habis masa berlakunya. Dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT No. 1390 Tahun 2000 beserta peta lampirannya lengkap namun dokumen hard copy tidak tersedia di lapangan. Tata Batas sudah selesai (temu gelang) namun sampai saat penilikan I belum terdapat SK Penetapan/Pengukuhan.	Sedang (2)
		1.1.2	IUPHHK HTI PT LESTARI ASRI JAYA telah menyelesaikan tata batas seluruh areal kerjanya namun belum terdapat bukti dokumen (hardcopy) yang ditunjukkan dan belum dapat menunjukkan SK Penetapan Batas dari Menteri Kehutanan. Batas areal kerja di lapangan kurang terpelihara dan sebagian besar hilang dan dalam setahun terakhir perusahaan tidak merencanakan pemeliharaan batas dalam RKTUPHHK-nya	Sedang (2)
		1.1.3	Eksistensi areal secara legal sebagian sudah diperoleh dengan adanya penandatanganan para pihak di dokumen	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			BATB. Namun demikian perusahaan juga memiliki data bahwa terdapat perambahan atau okupasi oleh masyarakat seluas 32.246 Ha yang tersebar di berbagai lokasi. Kondisi ini merupakan bukti masih terdapat konflik dengan masyarakat dan masih kurangnya pengakuan atas batas areal dan areal IUPHHK HTI PT LAJ	
		1.1.4	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan, sehingga verifier ini menjadi NotApplicable (NA) .	NA
		1.1.5	Terdapat pendataan sebagian penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Pendataan tersebut sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang. IUPHHK HTI PT LAJ telah melakukan upaya-upaya mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin, antara lain melakukan pendekatan persuasif.	Sedang (2)
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	IUPHHK HTI PT LAJ telah memiliki Visi dan Misi yang ditetapkan dengan SK Direksi. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.	Baik (3)
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) baik secara formal maupun secara informal berupa pencantuman Visi Misi di Name Tag Karyawan. Sementara sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar belum dilakukan termasuk pemasangan poster di tempat-tempat strategis. Pemahaman karyawan terhadap visi misi perusahaan juga masih belum baik.	Sedang (2)
		1.2.3	IUPHHK HTI PT LAJ berupaya implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun Beberapa kegiatan yang belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, antara lain komitmen penyelesaian tata batas dan pemeliharannya, memperbaiki atau memperpanjang dokumen perijinan lain, mencukupi kebutuhan minimal jumlah GANISPHPL, penyelesaian konflik dengan program kemitraan dan tanaman kehidupan, memaksimalkan hasil produksi, perlindungan dan pengamanan kawasan lindung	
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan berupa sarjana kehutanan dan lainnya belum diketahui. Sedangkan Keberadaan GANIS-PHPL masih jauh dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Pada saat penilikan IUPHHK HTI PT LAJ juga belum memiliki GANISPHPL Jipoktah yang seharusnya sudah dimiliki sehubungan dengan sudah terdapat produksi getah	Buruk (1)
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM lebih 100 % dari rencana sesuai kebutuhan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi getah yang membutuhkan tenaga sadap cukup banyak dan peminta untuk training sadap yang melebihi target perusahaan.	Baik (3)
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan IUPHHK HTI PT LAJ tersedia lengkap di kantor lapangan antara lain Peraturan Perusahaan, Laporan Bulanan TK, SK & SPK, dokumen BPJS TK dan BPJS Kesehatan, dokumen P2K3, SOP Ketenagkerjaan, Peraturan Perundangan tentang Ketenagkerjaan dan SK Gubernur Jambi tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	IUIPHHK HTI PT LAJ telah memiliki struktur organisasi yang lengkap di Pusat maupun di setiap Bisnis Unit (BU) dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/bagian/departemen yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial	Baik (3)
		1.4.2	IUIPHHK HTI PT LAJ telah memiliki perangkat SIM dan pelaksana. Perangkat untuk SIM yang dimiliki oleh IUPHHK HTI PT LAJ sudah menggunakan teknologi terkini yang memungkinkan komunikasi dan informasi manajemen menjadi lancar. Bila berjalan efektif dan dimanfaatkan secara optimal maka lalu lintas data dan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen maupun untuk kebutuhan para pihak akan mudah di akses. Hal ini juga berpengaruh terhadap control manajemen terhadap kinerja di semua bidang pekerjaan melalui penanggungjawab masing-masing bidang yang setiap saat dapat berinteraksi dengan kantor cabang, perwakilan atau pusat.	Baik (3)
		1.4.3	Direktur IUIPHHK HTI PT LAJ dibantu SPI dalam rangka melaksanakan pengawasan di perusahaan. SPI sudah melaksanakan tugasnya melakukan audit internal diperusahaan. Berdasarkan hasilnya SPI belum efektif karena belum melakukan monitoring dan evaluasi untuk semua bidang kerja/operasional perusahaan. Terdapat beberapa bidang seperti perencanaan dan pemanenan yang belum dilakukan monev padahal bidang tersebut merupakan bidang yang sangat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.	Sedang (2)
		1.4.4	Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp/site maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Monitoring dan evaluasi internal camp/site sebagian belum tersaji dengan baik dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik. Sedangkan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman.	
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	IUPHHK HTI PT LESTARI ASRI JAYA telah melakukan sosialisasi kegiatan RKT kepada masyarakat yang ada di sekitar areal kerjanya. Sosialisasi ini merupakan tahapan dalam rangka memperoleh pemahaman dari masyarakat terhadap kegiatan perusahaan khususnya RKT yang dilaksanakan setiap tahunnya. Saat ini persetujuan RKT diketahui dan disetujui oleh Instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.	Sedang (2)
		1.5.2	Proses pelaksanaan tata batas areal kerja IUIPHHK HTI PT LAJ dilaksanakan dan telah memperoleh pengakuan dari para pihak termasuk masyarakat yang terlibat langsung dalam proses tata batas. Pengakuan atas eksistensi areal IUIPHHK HTI PT LAJ oleh masyarakat belum sepenuhnya diperoleh terbukti adanya perambahan dalam bentuk pemukiman dan perladangan atau perkebunan tanpa ijin.	Sedang
		1.5.3	Sehubungan dengan penetapan program CD/CSR IUPHHK HTI PT LESTARI ASRI JAYA telah melaksanakan sosialisasi program CSR yang dalam implementasinya diperuntukkan Masyarakat di sekitar areal kerja perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung terdampak oleh kegiatan operasionalnya.	Sedang
		1.5.4	Proses penetapan kawasan lindung	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			yang ada di areal kerja IUPHHK HTI PT LESTARI ASRI JAYA telah disertai dengan sosialisasi keberadaan kawasan lindung melalui forum pertemuan atau rapat dengan para pihak. Pada saat ini sesuai data yang ada telah disosialisasikan ke sebagian besar para pihak termasuk masyarakat.	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT LAJ telah mempunyai RKUPHHK yang disusun berdasarkan Deliniasi Mikro dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta tidak ada kewajiban pemenuhan RKU.	Baik
		2.1.2	Implementasi penataan areal kerja di lapangan untuk RKT 2019 sebanyak 50,96% sesuai dengan peta dokumen jangka panjang (RKU).	Sedang
		2.1.3	PT LAJ telah melakukan sebagian pemeliharaan pal batas, papan nama dan tanda-tanda batas lainnya pada RKT 2017/2018 dan 2018/2019. Sekitar 65% pal batas RKT, plang dan tanda-tanda batas lainnya dapat ditemukan di lapangan.	Sedang
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	PT LAJ memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya ((jalur survei, peta pohon).	Baik
		2.2.2	PT LAJ telah memiliki plot PSP, sudah melakukan perhitungan riap tetapi belum melakukan analisis pengukuran penambahan diameter.	Sedang
		2.2.3	PT LAJ tidak memiliki bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan.	Buruk
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT LAJ masuk ke dalam area hutan tanah kering dengan sistem silvikultur THPB dan memiliki SOP terkait sistem silvikultur THPB dan sesuai dengan kondisi di lapangan.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		2.3.2	PT LAJ telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tetapi di dalam implementasinya masih sebagian yang terlaksana. Tahapan yang belum terlaksana optimal adalah Penataan Areal Kerja, Perpetaan, Register Petak, Pengadaan Bibit, Penanaman. Pemenuha terhadap SOP sebesar 64,29%.	Sedang
		2.3.3	Saat penilaian belum ada tanaman karet yang masak tebang sehingga verifier ini tidak dapat dinilai (Not Applicable).	Not Applicable
		2.3.4	Berdasarkan realisasi dari empat kegiatan terkait tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan, rata-rata pencapaian PT. LAJ berdasarkan dokumen RKT tahun 2018 sebesar 13,48%.	Buruk
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT. LAJ sudah memiliki SOP terkait kegiatan RIL, tersedia untuk seluruh kegiatan tetapi tidak ada bagian khusus yang menyebutkan tugas dan fungsi terkait usaha reduce impact logging (pemanenan ramah lingkungan).	Sedang
		2.4.2	PT LAJ melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan lebih dari tiga tahapan kegiatan pemanenan hasil khususnya pemanenan tanaman karet.	Baik
		2.4.3	PT. LAJ sudah melakukan aktivitas penanaman karet sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2017 tidak ada produksi kayu. Dengan demikian angka factor eksploitasi kayu tidak bisa dihitung (Not Applicable/NA).	Not Applicable
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT LAJ telah memiliki RKT 2018 – 2019 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang tetapi isinya belum sesuai dengan RKTU 2012-2021.	Sedang
		2.5.2	PT LAJ sudah memiliki peta kerja yang menggambarkan area yang dimanfaatkan dan area kawasan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			lindung dan sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	
		2.5.3	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (61,29%) batas blok terbangun/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	Sedang
		2.5.4	Lokasi, luas, jenis dan volume panen PT LAJ pada tahun 2014-2015 memiliki persentase kesesuaian sebesar 46,42%.	Sedang
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	kondisi kesehatan finansial PT LAJ Tahun 2018 yaitu nilai likuiditas sebesar 170,19%; nilai solvabilitas sebesar 217,11% dan nilai rentabilitas negatif sebesar -13,41%.	Sedang
		2.6.2	Rata-rata alokasi dana pengelolaan hutan PT LAJ 2018 sebesar 57,43%.	Buruk
		2.6.3	Simpangan realisasi alokasi dana kegiatan perusahaan hutan PT LAJ yang tertinggi adalah dengan nilai 78,78%.	Buruk
		2.6.4	Realisasi pendanaan PT LAJ untuk kegiatan kehutanan berjalan lancar tetapi tidak sesuai dengan tata waktu.	Sedang
		2.6.5	Realisasi kegiatan fisik penanaman oleh PT LAJ adalah 141,07% pada tanaman pokok tetapi tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk tanaman kehidupan.	Sedang
		2.6.6	Realisasi fisik penanaman PT LAJ tahun 2018 adalah 54,06%.	Sedang
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	Kawasan lindung PT Lestari Asri Jaya tercantum dalam beberapa dokumen perencanaan, antara lain AMDAL tahun 2009, RKUPHHK-HT pengesahan 20 Februari 2012, Revisi RKUPHHK-HT pengesahan 12 November 2012, dan Revisi RKUPHHK-HT pengesahan tanggal 6 Juli 2017. Adapun jenis kawasan lindung yang tercantum dalam dokumen perencanaan terakhir (Revisi	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		RKUPHHK-HT pengesahan tanggal 6 Juli 2018), antara lain Buffer Zone HL dan TN, Areal Sempadan Sungai, Areal KPPN, Areal DPSL, HCV dan HCS. Kawasan lindung PT LAJ tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya dikarenakan sebagian areal kawasan lindung diklaim masyarakat dengan ditanami tanaman sawit dan karet masyarakat.	
	3.1.2	PT Lestari Asri Jaya telah melakukan penataan batas untuk seluruh jenis kawasan lindung. Prestasi penataan batas kawasan lindung PT LAJ sebesar 65%. Tidak seluruh kawasan lindung dilakukan penandaan batas karena arealnya diklaim/dirambah masyarakat.	Sedang
	3.1.3	Kawasan lindung yang berhutan sebesar 1.948 Ha atau 16% dari luasan kawasan lindung keseluruhan, namun PT LAJ telah berupaya menghutankan kembali melalui kegiatan rehabilitasi dengan tingkat realisasi sebesar 80%, kegiatan rehabilitasi terdiri dari penanaman tumbuhan keras spesies alami dan pakan gajah. Kegiatan rehabilitasi belum berjalan maksimal terutama pada area berkonflik.	Sedang
	3.1.4	Kawasan lindung PT LAJ mendapat pengakuan dari para pihak yaitu dari Pemerintah Pusat dan Daerah melalui pengesahan dokumen ANDAL, RKUPHHK dan RKTUPHHK. Internal perusahaan melalui SK Penetapan Kawasan Lindung, dan masyarakat sekitar melalui kegiatan Forum Komunikasi Desa.	Baik
	3.1.5	PT Lestari Asri Jaya telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan lindung berdasarkan hasil tata ruang areal yang terdapat dalam RKUPHHK-HT revisi tahun 2017 yaitu Sempadan Sungai, BZ HLBL dan BZ	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			TNBT, DPSL, KPPN, HCV dan HCS.	
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT Lestari Asri Jaya telah memiliki prosedur perlindungan hutan, antara lain mencakup kebakaran hutan, pencurian hasil hutan, hama dan penyakit tanaman. Prosedur tersebut telah sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada yang juga disebutkan dalam dokumen AMDAL dan Revisi RKUPHHK-HT tahun 2017.	Baik
		3.2.2	PT Lestari Asri Jaya memiliki sarpras pengendalian kebakaran hutan, sarpras pencegahan pencurian kayu, dan sarpras pengendalian hama dan penyakit tanaman sesuai dengan ketentuan. Seluruh sarpras tersebut dalam kondisi baik.	Baik
		3.2.3	PT Lestari Asri Jaya memiliki SDM perlindungan hutan antara lain SDM pencegahan kebakaran hutan, SDM pencegahan pencurian hasil hutan, dan SDM pengendalian hama dan penyakit. Adapun jumlah dan kualifikasi SDM pencegahan kebakaran hutan sebesar 100%, SDM pencegahan pencurian hasil hutan sebesar 82,19%, dan SDM pengendalian hama dan penyakit tanaman sebesar 100%. Dengan demikian pemenuhan jumlah dan kualifikasi SDM perlindungan hutan sebesar $(100\% + 82,19\% + 100\%) : 3 = 94,06\%$.	Sedang
		3.2.4	PT Lestari Asri Jaya telah melaksanakan kegiatan perlindungan gangguan hutan dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada, antara lain pencegahan kebakaran hutan, pencegahan pencurian hasil hutan, dan pencegahan hama dan penyakit tanaman. Kegiatan perlindungan gangguan hutan yang dilaksanakan PT LAJ telah diimplementasikan melalui tindakan preemptif/preventif/represif.	Baik
3.3	Pengelolaan dan	3.3.1	PT Lestari Asri Jaya telah memiliki	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
pemantauan dampak terhadap tanah dan air		Standar Operasional Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air, nomor : LAJ-SOP-3.DIR-4-ED.01, tanggal 20 Februari 2017. Prosedur dimaksud belum seluruhnya mencakup dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan berdasarkan AMDAL pengesahan 11 Januari 2010. Prosedur mencakup dampak terhadap tanah dan air, yaitu : kualitas udara, kesuburan tanah (sifat fisik dan kimia tanah), erosi tanah (sedimentasi, debit sungai dan kualitas air), tetapi belum mencakup dampak terkait kualitas udara. Cakupan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebesar $5:6 \times 100 \% = 83,33\%$.	
	3.3.2	PT Lestari Asri Jaya memiliki daftar sarana untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana yang disebutkan dalam AMDAL pengesahan 11 Januari 2010, antara lain kesuburan tanah, sedimentasi, debit sungai, dan kualitas air. Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa daftar sarana dimaksud tidak sesuai serta sarana pemantauan kualitas udara ambien belum tersedia.	Sedang
	3.3.3	PT Lestari Asri Jaya memiliki daftar SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berjumlah 6 orang. Berdasarkan verifikasi lapangan dan wawancara diketahui bahwa jumlah SDM sudah cukup memadai dari segi jumlah dan kualifikasinya untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik
	3.3.4	PT Lestari Asri Jaya memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Dokumen	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			RKL pengesahan 11 Januari 2010, antara lain terkait kualitas air, kesuburan tanah (sifat fisik dan kimia tanah), dan erosi tanah (sedimentasi, debit sungai, dan kualitas air). Rencana pengelolaan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya.	
		3-3-5	PT Lestari Asri Jaya memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana yang disebutkan dalam Dokumen RPL pengesahan tanggal 11 Januari 2010, antara lain kualitas udara, iklim mikro, kesuburan tanah (sifat fisik dan kimia), erosi tanah, debit sungai, sedimentasi, dan kualitas air. Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan wawancara diketahui bahwa rencana pemantauan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Dokumen RPL pengesahan tanggal 11 Januari 2010.	Baik
		3-3-6	Berdasarkan telaah dokumen RKL-RPL semester mulai semester II tahun 2018 dan semester I tahun 2019, diketahui bahwa hasil pemantauan lingkungan masih dibawah baku mutu. Terdapat potensi terjadinya dampak terhadap tanah dan air akibat pengelolaan LB3 yang belum maksimal. Namun PT LAJ telah melakukan upaya penanggulangan yaitu dengan adanya tempat penampungan sementara LB3 dilengkapi izin yang sah sesuai ketentuan.	Sedang
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	PT Lestari Asri Jaya memiliki SOP identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik. Prosedur telah menguraikan tahapan-tahapan identifikasi flora dan fauna (mamalia, burung, herpetofauna) dan status perlindungannya telah mengacu berdasarkan Peraturan Menteri	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, CITES dan IUCN.	
		3.4.2	Berdasarkan data hasil kegiatan identifikasi flora fauna yang terdapat dalam dokumen AMDAL, HCVF dan dokumen Flora Fauna Dilindungi Periode semester 1 2018 diketahui bahwa hasil identifikasi flora dan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT LAJ.	Baik
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT Lestari Asri Jaya telah memiliki prosedur pengelolaan flora. Prosedur yang dibuat telah menguraikan terkait kriteria, pelestarian, pengelolaan In Situ, Pengelolaan Ex Situ, dan Penyelamatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur yang dibuat masih bersifat umum, belum secara spesifik untuk pengelolaan masing-masing jenis flora dilindungi.	Sedang
		3.5.2	PT Lestari Asri Jaya telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan flora, antara lain identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penyelamatan/perlindungan jenis. Kegiatan pengelolaan flora yang dilakukan masih bersifat umum belum spesifik untuk jenis-jenis yang dilindungi di areal PT LAJ.	Sedang
		3.5.3	Di areal PT LAJ masih terdapat kegiatan perambahan. Kegiatan perambahan tersebut juga terjadi pada area kawasan lindung yang merupakan habitat flora fauna dilindungi. Selain itu, PT LAJ dalam pengelolaannya, melakukan penanaman LCC (Land Cover Crop) jenis Mukuna bracteata, berdasarkan verifikasi lapangan spesies ini telah mendominasi beberapa titik areal	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			kawasan lindung meliputi Buffer Zone Taman Nasional dan area HCV (sekitar camp ranger) dan kawasan Sempadan Sungai Pemberihan yang menyebabkan spesies alami dalam kawasan tersebut tidak berkembang secara normal. Dengan demikian, keberadaan flora dilindungi di areal PT LAJ masih terganggu.	
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	PT Lestari Asri Jaya telah memiliki prosedur pengelolaan fauna. Prosedur yang dibuat telah menguraikan kriteria, pelestarian, pengelolaan In Situ, Pengelolaan Ex Situ, dan Penyelamatan meliputi seluruh jenis fauna dilindungi, jarang, langka, terancam punah, dan endemik.	Baik
		3.6.2	PT Lestari Asri Jaya telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan fauna, antara lain identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasinya. Kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan masih bersifat umum belum spesifik untuk jenis-jenis yang dilindungi di areal PT LAJ.	Sedang
		3.6.3	Di areal PT LAJ masih terdapat kegiatan perambahan. Kegiatan perambahan tersebut juga terjadi pada area kawasan lindung yang merupakan habitat fauna dilindungi. Selain itu, PT LAJ dalam pengelolaannya, melakukan penanaman LCC (Land Cover Crop) jenis Mukuna bracteata, berdasarkan verifikasi lapangan spesies ini telah mendominasi beberapa titik areal kawasan lindung meliputi Buffer Zone Taman Nasional dan area HCV (sekitar camp ranger) dan kawasan Sempadan Sungai Pemberihan yang menyebabkan spesies alami dalam kawasan tersebut tidak berkembang secara normal, sehingga secara langsung dapat mempengaruhi habitat fauna dilindungi. Dengan demikian,	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			keberadaan fauna dilindungi di areal PT LAJ masih terganggu tetapi ada upaya penanggulangan untuk mengendalikan gangguan spesies fauna dilindungi, melalui kegiatan Mitigasi konflik manusia dan satwa liar (patroli oleh ranger patrol dan sosialisasi kepada masyarakat) serta kegiatan rehabilitas kawasan lindung.	
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT LAJ telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH (jangka panjang dan jangka pendek) oleh pemegang izin berupa dokumen Andal, RKL, RPL, RKUPHHK-HTI PT LAJ tahun 2012 s.d 2021, RKT UPPHK-HTI 2018 & 2019, laporan pelaksanaan RKL dan RPL, studi pemetaan potensi dan resolusi konflik, identifikasi High Concervation Value (HCV).	Baik (3)
		4.1.2	PT LAJ telah memiliki mekanisme batas areal dengan kawasan kehidupan masyarakat dan mekanisme penyelesaian konflik batas areal. Mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif tidak diatur secara khusus sebagai mekanisme sendiri, mekanisme tersebut merupakan perpaduan dari berbagai perangkat SOP dari berbagai bidang/departemen. PT LAJ telah melakukan sosialisasi dan inventarisasi secara partisipatif sebagian lahan yang telah diokupasi masyarakat di dalam areal kerjanya.	Sedang (2)
		4.1.3	PT LAJ telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa: Kebijakan Pengembangan Hutan Tanaman Industri PT LAJ dan PT WW (group usaha RLU) bagi	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>masyarakat yang berada di kawasan hutan tanaman industri PT LAJ dan PT WW dan penandatanganan kesepakatan bersama oleh para pihak, perencanaan Program Kelola Sosial PT LAJ telah mengakomodir keberadaan hak-hak dasar masyarakat lokal/setempat. Proses pelaksanaan program kegiatan kelola sosial mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat dan terdapat realisasi terhadap 12 desa binaan dan komunitas SAD. Selain itu program kelola sosial dilakukan di beberapa Permukiman di dalam areal kerja PT LAJ. Pada tahapan perencanaan dan realisasi belum seluruhnya sinkron dengan dokumen pokok seperti dokumen RKT, dengan demikian ketersediaan mekanisme pengakuan hak yang tersedia belum lengkap, jelas dan belum mengacu kepada pedoman hirarki perencanaan jangka panjang dan jangka pendek secara komprehensif.</p>	
	4.1.4	<p>PT LAJ telah melakukan penataan batas antara kawasan kehidupan masyarakat melalui identifikasi dan inventarisasi mengenai keberadaan sebagian kebun masyarakat di dalam areal kerja. Pendataan dan informasi disajikan berdasarkan tahun RKT dilengkapi dengan peta serta berita acara hasil pengukuran lahan yang diketahui oleh pemilik lahan, namun tidak diatur penandaan lapangan. Pendataan dan penandaan di lapangan dilakukan secara paralel dengan kegiatan RKT. Penataan Batas areal kerja PT LAJ telah selesai namun auditee belum dapat menunjukkan dokumen (hardcopy) dan SK Pengukuhan atau Penetapan dari instansi terkait.</p>	Sedang (2)
	4.1.5	<p>Keberadaan pengelolaan kawasan hutan oleh PT LAJ telah mendapat persetujuan dan legalitas dari pemerintah dan mendapat pengakuan</p>	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dari sebagian masyarakat lokal/setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Masih terdapat konflik penguasaan dan penggunaan lahan oleh masyarakat, namun masih teridentifikasi sebagian (belum keseluruhan) dan menunjukkan proses konflik dapat dikelola.	
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT LAJ memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan/pemegang izin kepada masyarakat. Dokumen yang tersedia meliputi legalitas IUPHHK-HT, dokumen perencanaan, dokumen prosedur, dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen hasil kajian. Sebagian dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mendapatkan pengesahan dari pihak berwenang. Namun demikian masih terdapat beberapa dokumen yang perlu sinkronisasi lebih lanjut mengenai validitas data dan informasi serta referensi sesuai aturan perundangan terkait dan tanggung jawab para pihak (dinas terkait, masyarakat sekitar).	Sedang (2)
		4.2.2	PT LAJ memiliki mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Namun, keberadaan mekanisme yang tersedia belum lengkap, menyeluruh dan dapat ditelusuri terhadap bidang/aspek yang dimandatkan dalam SK IUPHHK-HTI.	Sedang (2)
		4.2.3	PT LAJ telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar areal kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan pertemuan dalam bentuk forum komunikasi rutin baik tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten, sedangkan secara tidak langsung melalui perangkat organisasi dan fungsi kehumasan. Sosialisasi telah dilakukan	Baik (3)

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		kepada seluruh desa sekitar areal kerja PT LAJ serta masyarakat permukiman dan komunitas di dalam areal kerja PT LAJ.	
	4.2.4	PT LAJ secara umum telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Realisasi tanggung jawab dapat dibuktikan, terdapat sebagian keberadaan bukti dokumentasi, namun belum mencakup seluruh masyarakat dan belum tersaji dengan baik. Kegiatan yang terealisasi berupa program CSR berupa: Identifikasi faktor potensial dan konflik sosial, Community Partnership Program (Program Kerjasama Masyarakat) yang terdiri dari Community Development Program (Program Pemberdayaan Masyarakat) dan Community Support Program (Program Dukungan Masyarakat), Indigeneus communities management (Program Pendampingan Komunitas Masyarakat Adat) dan Develop good relation with external/internal stakeholders (Mengembangkan Hubungan yang Baik dengan Ekternal/Internal Stakeholders. Kewajiban berupa pemenuhan tanaman kehidupan belum terealisasi.	Sedang (2)
	4.2.5	PT LAJ memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Terdapat data akuisisi lahan tahun 2018 dan 2019 (s.d Oktober 2019) dalam dokumen rekap MoU Perolehan Lahan PT LAJ, dokumen penyerahan tali asih, dokumen berita acara (sosialisasi, kesepahaman, kemitraan, forum komunikasi), laporan keuangan, Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tahun 2018	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			semester II dan 2019 semester I, dokumen rencana dan realisasi CSR 2018 dan 2019, Surat Komitmen Perusahaan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Pelaksanaan tanggung jawab yang melibatkan lintas departemen belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik, tertata, tersaji dan dilaporkan sesuai dengan otoritas pelaporan yang berlaku di manajemen PT LAJ, khususnya pelibatan sumberdaya perusahaan yang berhubungan dengan kelola sosial, investasi sosial dan konflik sosial.	
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT LAJ memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data-data kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya yang tersebar pada beberapa dokumen pokok (RKU, RKT, RKL/RPL, Andal), dokumen hasil studi/identifikasi, data ketenagakerjaan dan data inventarisasi lahan. Terdapat data studi/identifikasi HCV dan pemetaan potensi dan resolusi konflik. Informasi masyarakat hukum adata dan atau masyarakat setempat dokumen tersebut meliputi: Kec. VII Koto (Desa Pucuk Jambi, Kuamang, Teluk Kayu Putih, Sungai Abang dan Auri Cino), Kec. Serai Serumpun (Desa Napal Putih), Kec. Tebo Ulu (Desa Teluk Kual dan Malako Intan), Kec. Sumay (Desa Pelayungan, Muara Sekalo, Suo-Suo, dan Semambu), dan Komunitas Suku Anak Dalam atau Orang Rimba.	Baik (3)
		4.3.2	PT LAJ memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum tersedia lengkap khususnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan dan lahan. Dalam areal kerja PT	Sedang (2)

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			LAJ terdapat masyarakat yang tinggal dan berladang/berkebun. Kelengkapan mekanisme dan prosedur kerjasama usaha kebutuhan barang dan jasa dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, dan lain-lain belum tersedia.	
		4.3.3	PT LAJ telah memiliki dokumen perencanaan menyangkut peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang termuat dalam dokumen: RKUPHHK-HTI PT LAJ, RKT UPHHK-HTI PT LAJ tahun 2018 & 2019, RKL, RPL, RKT CSR tahun 2018 & 2019. Realisasi pelaksanaan termuat dalam dokumen laporan realisasi CSR 2018 & 2019 dan laporan UKL UPL tahun 2018 semester II dan tahun 2019 semester I.	Baik (3)
		4.3.4	Sebagian besar implementasi jenis program/kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah direalisasikan dan tepat sasaran. Implementasi program terkait meliputi pembangunan demplot, kerjasama koperasi, membangun kemitraan dan rekrutmen tenaga kerja lokal, dapat dibuktikan sebagian besar (>50%).	Baik (3)
		4.3.5	PT LAJ memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yakni karyawan, masyarakat sekitar dan pemerintah. Namun keberadaan laporan dan dokumen terkait masih bersifat parsial dan tidak terdokumentasi dengan baik. Penyajian dokumen data dan informasi cukup lengkap untuk tahun 2018.	Sedang (2)
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT LAJ memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah mengacu kepada Perdirjen PHPL No. 5 Tahun 2016 tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi dan secara implementatif telah	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dilaksanakan. Resolusi konflik yang telah diupayakan PT LAJ telah mengikuti rekomendasi dari hasil studi pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2017 dan pendekatan resolusi konflik berdasar status konfliknya sesuai peraturan.	
		4.4.2	PT LAJ telah melakukan studi Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di PT LAJ dan PT WW (group usaha) tahun 2017 dan pembaharuan/update studi pada bulan Oktober 2019 yang bertujuan untuk: pembaharuan database dan peta potensi konflik, evaluasi perkembangan program dan kegiatan resolusi konflik, kajian efektifitas resolusi konflik dan rekomendasi keberlanjutan resolusi konfliknya. PT LAJ belum melakukan kewajiban pelaporan pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai Perdirjen PHPL No. 5 Tahun 2016 periodik 6 bulan sekali kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal PHPL dan BPHP.	Sedang
		4.4.3	PT LAJ telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dinamakan Tim Resolusi Konflik (TRK) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi no 168/ Kpts/Dishut-5.3/VIII/2018 yang didukung oleh para pihak dan beraggotakan perwakilan KLHK, pemerintah Prov. Jambi, pemerintah Kab. Tebo, LSM/NGO, lembaga adat, lembaga studi dan perwakilan kedua perusahaan (PT LAJ dan PT WW). TRK terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi No. SK.263/Kpts/Dishut-5.3/XII/2018 yang terdiri dari 3 Pokja, yaitu: Pokja Sosialisasi Dan Inventarisasi, Pokja Mediasi Dan Pokja Suku Anak Dalam. Keberadaan kelembagaan resolusi konflik telah disosialisasikan kepada	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			masyarakat dan pemangku lainnya. PT LAJ memiliki perangkat internal yang berhubungan langsung dengan kelembagaan resolusi konflik dan anggaran CSR khusus konflik yang cukup memadai.	
		4.4.4	PT LAJ telah melakukan upaya pendekatan penyelesaian/resolusi konflik melalui mekanisme pendekatan penyelesaian alternative (alternative Dispute Resolution/ADR atau alternatif penyelesaian sengketa), mekanisme pendekatan kesejahteraan, dan mekanisme legal atau jalur hukum formal. Proses identifikasi, sosialisasi/mediasi, penyerahan bantuan, kerjasama, dan penegakan hukum terdokumentasi dalam berita acara atau laporan kegiatan. Setiap dokumen proses dan hasil mendapat otoritas dan ditandatangani bersama para pihak.	Baik
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	Terdapat hubungan industrial antara unsur pengusaha (PT LAJ), tenaga kerja/buruh dan pemerintah berdasarkan Peraturan Perusahaan (proses pengajuan kembali ke Kementerian Ketenagakerjaan). Sebagian besar hubungan industrial telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang
		4.5.2	Peningkatan kompetensi bersifat kondisional, tentatif dan responsif. Terdapat pelaporan hasil rencana dan realisasi peningkatan dan pengembangan kompetensi (pendidikan dan latihan) Tahun 2018/2018 dengan pesentase realisasi 106,98%.	Baik
		4.5.3	PT LAJ telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan digunakan sebagai acuan dalam melakukan rotasi karyawan. Kebijakan kenaikan	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		jabatan/status karyawan dilaksanakan secara adil melalui penilaian rutin kinerja setiap karyawan.	
	4.5.4	PT LAJ memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah termaktub di dalam Peraturan Perusahaan. Sebagian besar fasilitas yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan tersedia dan memadai. Karyawan bulanan sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, terdapat realisasi dan bukti yang cukup.	Baik

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT Lestari Asri Jaya memperoleh IUPHHK-HT melalui SK Menteri Kehutanan No. SK Menteri Kehutanan No. SK 141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Lestari Asri Jaya atas Areal Hutan Produksi seluas + 61.495 ha di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang disahkan oleh Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. Dokumen ini dilengkapi dengan peta lampiran SK IUPHHK sesuai dengan luas areal dan tanggal penerbitan.	Memenuhi
		1.1.1.b	PT Lestari Asri Jaya sudah memenuhi kewajiban membayar IHPH (IIUPHHK) sesuai dengan SPP yang sudah diterbitkan oleh Kementean Kehutanan. Pembayaran dilakukan tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 159.887.000,00 dan sama dengan jumlah SPP IUPHHK-HT No. S.315/VI-BIKPHH/2010 tanggal 16 April 2010.	Memenuhi
		1.1.1.c	Berdasarkan Surat pernyataan dari direktur utama PT LAJ (Hussein Kartadjoemena) nomor 72/DIR/LAJ-X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dinyatakan bahwa tidak ada penggunaan yang syah diluar sektor kehutanan di areal PT LAJ dan hasil observasi lapangan diketahui tidak ada tidak ada penggunaan kawasan yang syah/berizin di luar sektor kehutana dia	Tidak Bisa Dinilai (Not Applicable)

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			areal IUPHHK-HT PT LAJ.	
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki RKUPHHK-HT periode tahun 2012-2021 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HT. PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2019 dan 2018 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dilampiri peta RKT 2019 dan 2018 yang dibuat oleh ganis PHPL Canhut.	Memenuhi
		2.1.1.b	PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki peta yang menyebutkan areal yang dilindungi dan hasil verifikasi lapangan ditemukan adanya areal yang tidak boleh ditebang.	Memenuhi
		2.1.1.c	PT Lestari Asri Jaya sudah membuat penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta lampiran RKT 2019 dan RKT 2018 , sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti di lapangan.	Memenuhi
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki dokumen RKUPHHK-HT dan peta lampirannya untuk periode 2021-2021 sudah disahkan berdasarkan SK.Menteri Kehutanan No. 13/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan telah direvisi dengan Revisi RKUPHHK-HTI disyahkan berdasarkan SK.Menteri Kehutanan No. 77/VI-BUHT/2012 tanggal 12 November 2012 dan Revisi Revisi RKUPHHK-HT disyahkan dengan SK mrnteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor No. 3806/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/ 2017 tanggal 6 Juli 2017. dokumen RKUPHHK-HT dan Revisi RKUPHHK-HT dilampiri peta yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT Lestari Asri Jaya adalah untuk pengelolaan tanaman. Kegiatan land clearing sudah dilakukan setiap tahun dan penanaman sudah dilakukan setiap tahun RKT. Hanya saja realisasi belum sebesar dokumen RKT karena masih tingginya konflik lahan dengan masyarakat. Kegiatan land clearing dari hutan alam tahun 2019 dan 2018 tidak ada karena land clearing dilakukan dari semak belukar. kegiatan land clearing	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			sudah sesuai dengan peta RKT 2019 yang diizinkan dan produksi kayu nihil.	
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	PT LAJ sudah memiliki dokumen LHP – HHBK periode Oktober 2018 – September 2019 yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang sejumlah 267,33 ton getah karet, lengkap, LHP dengan fisik sesuai berdasarkan hasil BAP oleh P2LHP dari KPHP Tebo Barat, Jambi.	Memenuhi
		3.1.2	Semua getah yang diangkut dari TPH getah ke Gudang dan ke Industri selalu dilengkapi dengan dokumen yang sah. Getah dari Gudang Getah ke industri dilengkapi dengan dokumen Form Permohonan Kendaraan Dinas : Keluar area Salak – Sumay dan Wanamukti IUPHHK – HA PT Lestari Asri Jaya. Semua pengangkutan getah bertujuan ke Kota Jambi dan diangkut dengan truk.	Memenuhi
		3.1.3.a	PT LAJ mendapatkan izin usaha untuk IUPHHK-HT getah atau hasil hutan bukan kayu. Dengan demikian perusahaan tidak memiliki barcode atau tanda-tanda PUHH.	Tidak Bisa Dinilai (Not Applicable)
		3.1.3.b	PT Lestari Asri Jaya sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas getah (seperti: no. petak, TPH, gudang getah, jumlah, dan tujuan pengangkutan) untuk setiap volume getah yang diproduksi atau diangkut ke industri.	Memenuhi
		3.1.4	Dalam setiap pengangkutan getah keluar dari perusahaan selalu dilengkapi dengan dokumen Form Permohonan Kendaraan Dinas : Keluar area Salak – Sumay dan Wanamukti. Dokumen ini jelas siapa pengguna dokumen, yang menyetujui dan penerima.	Memenuhi
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dokumen SPP PSDH PT Lestari Asri Jaya telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk periode Oktober 2018 – September 2019 sebesar Rp 40.099.500.	Memenuhi
		3.2.1.b	PT Lestari Asri Jaya sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran PSDH sesuai SPP untuk Oktober 2018 – September 2019 sebesar Rp 40.099.500,-	Memenuhi
		3.2.1.c	PT Lestari Asri Jaya sudah menggunakan tarif PSDH sesuai dengan ketentuan	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			Peraturan Menteri LHK Nomor P.64/MENLHK/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan dan sudah dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku. PT Lestari Asri Jaya dalam audit bisa menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	PT Lestari Asri Jaya dalam kegiatan pemasarannya menjual kayu ke Jambi sehingga tidak memerlukan pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Tidak bisa dinilai (Not Applicable)
		3.3.2	PT LAJ menjual karet ke Provinsi Jambi sehingga tidak menggunakan kapal.	Tidak bisa dinilai (Not Applicable)
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Hasil Produksi PT LAJ periode Oktober 2018 – September 2019 adalah karet sehingga tidak ada V-Legal.	Tidak bisa dinilai (Not Applicable)
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PT Lestari Asri Jaya telah memiliki Dokumen SEL (AMDAL)/RKL/RPL meliputi Dokumen ANDAL , RKL dan RPL PT LAJ disahkan oleh SK Gubernur No. 10/Kep.Gub/ BLHD/ 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan IUPHHK-HT oleh PT Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Memenuhi
		4.1.2.a	PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Gubernur No. 10/Kep.Gub/BLHD/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan IUPHHK-HT oleh PT Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.	Memenuhi
		4.1.2.b	PT Lestari Asri Jaya sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Memenuhi
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki dan mengimplementasikan K3 di lapangan. Prosedur K3 sudah didokumentasikan	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			disahkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan bidang masing-masing dan terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.	
		5.1.1.b	PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik dan belum kadaluarsa.	Memenuhi
		5.1.1.c	PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap setiap bulan dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.	Memenuhi
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki Surat Pernyataan Nomor 74/DIR-LAJ/XII/2016 Perusahaan memberikan kebebasan berserikat atau membentuk serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan. Surat Edaran ini disahkan tanggal 30 Desember 2016 oleh Direktur Utama PT LAJ, yang berisi tentang memberikan kebebasan kepada karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja di dalam lingkup perusahaan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dan hasil wawancara dengan karyawan diketahui ada kebebasan berserikat.	Memenuhi
		5.2.2.	PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) No. KEP 1140/PHLISK- PK/ PP/IX/2017 tanggal 14 September 2017. PP. PT LAJ disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tentang pengesahan peraturan perusahaan PT Lestari Asri Jaya tanggal 14 September 2017.	Memenuhi
		5.2.3.	PT Lestari Asri Jaya tidak mempekerjakan karyawan yang dibawah umur. Hal ini bisa ditunjukkan dari dokumen daftar tenaga kerja karyawan PT Lestari Asri Jaya dan berdasarkan wawancara dengan manajemen dan karyawan perusahaan.	Memenuhi